



Kemenkeu: Penerapan PPN 12 Persen Bakal Lanjut

Pastikan Ada Subsidi yang Menjadi Jaring Pengaman Daya Beli

JAKARTA - Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen terus bergulir. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Parjiono menuturkan, pemerintah akan tetap memperhatikan dam-

pak kenaikan tarif PPN pada daya beli masyarakat.

Parjiono menyebutkan, kebijakan kenaikan tarif PPN itu akan dikecualikan dari beberapa kelompok masyarakat miskin, sektor kesehatan, maupun pendidikan.

"Kami masih dalam proses ke sana, artinya akan berlanjut pelaksanaan PPN 12 persen. Tetapi, kami juga melihat dari (berbagai) sisi, khususnya menjaga daya beli masyarakat. Di situ kan

DAFTAR BARANG DAN JASA TIDAK TERKENA PPN 12

- Makanan dan minuman yang tersaji di restoran, hotel, warung, rumah makan, dan sejenisnya
- Jasa perhotelan
- Jasa penyediaan tempat parkir
- Jasa boga atau catering
- Beras dan gabah
- Jagung
- Sagu
- Kedelai
- Uang, emas batangan yang digunakan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga
- Jasa keagamaan
- Jasa kesenian dan hiburan
- Garam konsumsi
- Daging
- Telur
- Susu perah
- Buah-buahan
- Sayur-sayuran
- Ubi-ubian
- Bumbu-bumbuan
- Gula konsumsi kristal putih

Sumber: UU HPP, PMK 116/2017

pengecualiannya sudah jelas: untuk masyarakat miskin, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya di sana," ujarnya dalam Sara-

sehan 100 Ekonom di Jakarta kemarin (3/12).

Seperti diketahui, kenaikan tarif PPN tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (HPP). UU tersebut mengatur tarif PPN sebesar 11 persen berlaku pada 1 April 2022 dan 12 persen berlaku paling lam-

HERLAMBAH BINTANG/JAWA POS



bat 1 Januari 2025.

Parjiono memastikan, keberadaan subsidi bakal menjadi jaring pengaman. Saat ini, pemerintah tengah fokus menjaga daya beli masyarakat. Yakni, dengan menjalankan program-program perlindungan sosial. Hal itu berkorelasi pada keberadaan subsidi dan insentif perpajakan.

"Daya beli jadi salah satu prioritas, kita perkuat juga subsidi jaring pengaman," tambah dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen diperlukan orkestrasi pemerintahan yang *smart* untuk segera menyelesaikan berbagai tantangan dan pekerjaan rumah yang ada.

Saat ini, jika melihat struktur pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi 51 persen. (dee/c7/dio)